

KONSEPSI DASAR TENTANG  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
DI PERGURUAN TINGGI

Oleh :  
M. Mansur Ibrahim  
Budiono  
M. Syahri Rusman

PANITIA LOKAKARYA KURIKULUM MKPK PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Di

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Mei 2000

# KONSEPSI DASAR TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

---

## A. Dasar Pemikiran

Pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan disini kami ketengahkan dasar-dasar alasan sebagai berikut :

1. Judul yang kami ketengahkan ini mengandung suatu pemahaman bahwa konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk uraian dari konsep-konsep yang terangkai secara terkait dalam upaya pembentukan kepribadian bangsa dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta komponen yang ada dalam kurikulum, baik dalam kerangka teori maupun arahan aktualitannya.
2. Isi pokok pada Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pokok-pokok bahasan sebagaimana tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 267/DIKTI/KEP/2000, yang berisikan :
  - a. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup:
    - 1) Hak dan Kewajiban Warga negara
    - 2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
    - 3) Demokrasi Indonesia
    - 4) Hak Azasi Manusia
  - b. Wawasan Nusantara
  - c. Katahanan Nasional
  - d. Politik dan Strategi Nasional
3. Bahan atau materi mengenai masalah Pendidikan Kewarganegarann diatas secara rinci tidak diurai secara ilmiah melainkan hanya dikemukakan pada hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan formal mengenai Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.
4. Berbicara pendidikan, berarti berbicara tentang masa depan, artinya mempersiapkan anak didik dalam menghadapi masa yang akan datang. Karena sebagai generasi yang kelak kemudian hari akan menjawab segala tuntutan jaman

bahwa masa akan berjalan terus dengan segala perubahan-perubahan silih berganti. Didunia ini kiranya hanya perubahan saja yang kekal oleh sebab itu kita tidak bisa meninggalkan atau bahkan lari dari tanggung jawab terhadap anak didik dalam rangka mengikuti dan menjawab tuntutan perubahan tersebut. Apabila kenyataan ini dijadikan sebagai titik tolak membicarakan permasalahan pada Pendidikan Kewarganegaraan maka konsepsi teoritis dan pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kemampuan warga negara dalam suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya sangat diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional kepada para mahasiswa calon ilmuwan warga negara RI yang mengkaji dan akan menguasai ipteks, menjadi tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan. .
  - c. Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemyupukan nilai-nilai, sikap dan kepribadian seperti tersebut diatas diandalkan pada Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan disamping Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, serta Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan.
5. Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan, tentunya untuk memenuhi tuntutan tujuan pendidikan nasional. Adapun rangkaian formal mengenai masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Pendidikan Nasional yang berakar pada budaya bangsa Indonesia diuraikan untuk

bangsa. Sedang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sifat cerdas yang dimaksud tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedang sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika ataupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

## B. Pembahasan

Berdasar pada kompetensi yang diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan memperhatikan ketentuan formal dapat dilakukan dengan bertolak pada empat macam komponen pokok, yaitu: Tujuan, isi/bahan, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Kerangka pikir ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1950) bahwa dalam pengembangan kurikulum diidentifikasi melalui 4 (empat) pertanyaan fundamental yang harus dijawab.

1. Tujuan-tujuan Pendidikan apakah yang hendak dicapai
2. Pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang disediakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Bagaimanakah pengalaman pendidikan itu diorganisir atau disusun secara efektif
4. Bagaimanakah dapat diketahui dan ditentukan bahwa tujuan tersebut telah dicapai.

Bertolak dari 4 (empat) masalah tersebut akan dijadikan sebagai dasar analisis terhadap sistem perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana yang berjalan di Universitas Muhammadiyah Malang dewasa ini.

### 1. Analisis Tujuan

Sebelum sampai pada masalah isi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, dicoba untuk mengetengahkan masalah yang ada didalam ruang lingkup teori, yang kemudian akan mempengaruhi terhadap kurikulum serta buku bacaan atau referensi yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Mencermati dari suatu tujuan sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 267 Tahun 2000 tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Selanjutnya dinyatakan bahwa: Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan ketepatan materi instruksionalnya, dikembangkan kecocokan metodologi pengajarannya dan dibenahi efektifitas manajemen pembelajarannya dan termasuk kualitas dan prospek karier pengampunya.

Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menyebutkan bahwa kompetensi yang diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pandahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Adapun kompetensi dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab seseorang warganegara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran serta patriotisme nilai pengorbanan, berada pada ruang lingkup *filosofi*. Adapun hal yang bersifat aktif dimasukkan sebagai tuntutan proses pendidikan yang berorientasi kedepan dapat masuk pada ruang lingkup *ideologi*. Dan bilamana kita terjemahkan kedalam kehidupan yang lebih nyata, sikap dan perilaku serta pandangan/wawasan akan berada dalam lingkup *moral*.

Apabila hal ini dipergunakan sebagai pangkal tolak untuk memenuhi maksud dan tujuan pada proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengorganisir kegiatan kurikuler dengan memperhatikan posisi dan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Dengan memperhatikan cara penggarisan seperti diatas maka Pendidikan Kewarganegaraan tersebut membawa pesan ranah kognitif, afektif kemudian sampai pada psikomotor. Artinya ada muatan penguasaan terhadap pengetahuan serta pemahaman pada masalah dasar kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi melalui penerapan pikiran yang berlandaskan pada Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Kenyataan seperti ini membawa pesan dan kesan ada pada lingkup Pendidikan Politik dalam arti luas, karena juga menekankan pada kepentingan nasional dan bukan individu dan golongan disamping juga Pendidikan Yuridik berkenaan dengan dasar kehidupan politik nasional berdasarkan Konstitusi.

Atas dasar pemikiran ini Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipilah menjadi dua peranan, meskipun pada akhir keduanya akan bertemu pada tujuan secara umum. Pendidikan politik lebih menekankan pada aspek kognitif dalam kehidupan manusia sebagai warga masyarakat pada umumnya sedangkan pendidikan yuridik lebih menekankan pada sikap, ketahanan terhadap aspek aspek

Berhubungan dengan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan dijiwai konsep keserasian antara hubungan individu dengan individu dalam masyarakat. Konsep keserasian itu, masih memerlukan sikap toleransi, terbuka serta lapang dada. Ini memberikan pengertian bahwa untuk mewujudkan semua itu masih dibutuhkan serentetan sifat-sifat lainnya di alam kehidupan bermasyarakat. Kerangka ini memberikan kesimpulan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki pesan terhadap Pendidikan Sosial. Berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana layaknya manusia komponen bangsa sudah barang tentu wawasannya harus bersifat integratif (nasional) karena adanya kehidupan yang pluralistik seperti masyarakat bangsa Indonesia.

Berhubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang erat kaitannya dengan kehidupan bernegara dengan ruang lingkup pendidikan politik yuridik, pesan yang harus ditekankan adalah aspek pandangan yang integralistik. Negara tidak mementingkan golongan melainkan kepentingan nasional sebagai keseluruhan. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan pada tataran ini harus menekankan arti penting pemahaman pada sikap kepatuhan terhadap mekanisme pengambilan keputusan secara konstitusional. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era sekarang ini sudah menjadi sebuah kenyataan dan juga merupakan sebuah tuntutan kontinuitas karena itu juga harus mendapat perhatian dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi ke masa depan (progresif).

## 2. Analisa Pengalaman Belajar

Keseluruhan pengalaman belajar yang diprogramkan melalui kegiatan yang telah direncanakan merupakan jawaban dari serentetan harapan terhadap mahasiswa kelak setelah lulus. Ini berarti dengan menyerap keseluruhan pengalaman belajar yang disajikan, mahasiswa dapat memiliki pemahaman terhadap kompetensi tugas profesinya. Logis kiranya pengalaman belajar dalam rangka Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan menjadi sejumlah kajian terhadap masalah-masalah, konsep-konsep, teori-teori serta kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penguasaan materi yang berada dalam lingkup Pendidikan

22. Berhubungan dengan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan dijiwai konsep keserasian antara hubungan individu dengan individu dalam masyarakat.

melalui pengorganisasian terhadap seperangkat pengajaran yang dibutuhkan. Semuanya itu diorganisir menjadi satuan isi dalam bentuk pokok bahasan/sub pokok bahasan dan kemudian diadakan taksiran waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya pengalaman pengajaran tersebut. Contoh : Taksiran waktu mempergunakan perbandingan sbb: 4 : 2 ( 4 : Pengalaman teori ; 2: Pengalaman praktek ). Dalam melakukan taksiran tersebut juga perlu dipertimbangkan berapa bobot Satuan Kredit Semester (SKS) dan Jam Semester (JS).

Pengorganisasian Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan harus memperhatikan aspek ranah maupun lingkup materi yang akan disajikan. Pendidikan Kewarganegaraan, yang memiliki lingkup Pendidikan Politik serta Pendidikan Yuridik harus dijadikan sebagai kreterium untuk menentukan pengalaman belajar. Kreteria ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan mengorganisir bahan melalui Pokok bahasan/Sub Pokok Bahasan, mana yang menjadi prioritas pencapaian tujuan pengajaran dan mana yang dapat dijadikan bahan pendalaman atau pengayaan.

Mendasarkan pada analisis lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan diatas (Pendidikan Politik dan Pendidikan Yuridik) sebagai pandangan yang agak berbeda dengan pengajaran Pendidikan Kewiraan yang selama ini lebih bersifat Pendidikan Politik Normatif yang lebih menekankan pada pola induktrinatif. Ini dimaksudkan untuk menyelaraskan pemikiran ilmiah dengan suatu kenyataan yang berkembang dewasa ini. Oleh sebab itu apa yang terurai dalam Pendidikan Kewarganegaraan baik sikap dan perilaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setidaknya diambil langkah dalam penyampaiannya tidak bersifat "induktrinatif" tetapi pengembangannya harus kreatif dan karena itu haruslah dipergunakan cara demokratis dialogis. (lihat Keputusan Dir.DIKTI Nomor :267/DIKTI/KEP/2000 )

### 3. Analisis Kegiatan Belajar Mengajar

Fungsi pokok dari kegiatan belajar mengajar atau kegiatan perkuliahan adalah



konsep dan teori serta latihan-latihan maupun terjun dilapangan dalam rangka Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan atau mata kuliah tertentu dimana mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar seperti yang dituntut dalam kurikulum. Melalui kegiatan inilah kurikulum mewujudkan diri dalam bentuknya yang paling nyata (actual Curriculum). Pada stadium ini kurikulum tertulis berbau dengan kurikulum yang tersembunyi dalam diri pendidik (dosen) (hidden curriculum), yang secara intens memberikan arah, isi, strataegi dalam aktualitas kegiatan perkuliahan.

Untuk menjaga agar kegiatan perkuliahan sejauh mungkin dapat dipertanggung jawabkan kepada tuntutan kurikulum disatu pihak tuntutan perkembangan di lapangan dilain pihak. Maka matakuliah dikembangkan kedalam silabus dan selanjutnya masing-masing dosen menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Dalam pembuatan SAP setidaknya telah memperhitungkan secara cermat jenis dan alokasi waktu dari masing-masing kegiatan perkuliahan sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku dalam sistem kredit semester yang berlaku.

Contoh :

Jenis dan waktu kegiatan perkuliahan setiap minggu/semester

Untuk Mata kuliah dengan bobot SKS 2

No	Kegiatan perkuliahan	Tatap muka /menit	Tugas terstruktur	Tugas mandiri
01	Teori	1 x 50	50 menit	100 menit
02	Praktek di lapangan	1 x 50	50 menit	100 menit

Adapun yang berkenaan dengan metodologinya, harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Walaupun disadari bahwa tidak ada satu-satunya yang terbaik karena setiap akan bertujuan mencapai tujuan tertentu. Hal yang berkenaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, dalam menentukan strategi metoda perkuliahan sejauh mungkin menggunakan strategi dan metoda yang kadar CBMA tinggi dengan taidak mengabaikan sifat demokratis dialogis.

solving, studi kasus, Diskusi, Brainstorming, seminar, simulasi dan lain-lain yang sejenis. Pemilihan metode semacam ini bukan saja berfungsi untuk menstimulasi intensitas keterlibatan pada mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan melainkan juga untuk membiasakan mereka dengan strategi dan metode dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya, baik pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### 4. Analisis Evaluasi

Ada dua macam penilaian dilihat dari konteksnya, yaitu yaitu penilaian program kegiatan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dan penilaian hasil belajar. Berdasarkan konteks pengembangan atau penyempurnaan dibidang Pendidikan Kewarganegaraan melalui pendekatan institusional patut untuk dilakukan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan matakuliah pengembangan kepribadian sebagai penyempurnaan dari matakuliah Pendidikan Kewiraan. Dilihat dari tingkat kedalaman serta luasnya isi dengan tujuan yang hendak dicapai patut untuk dicermatai. Artinya pelaksanaan program perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan kelak nanti dilaksanakan harus dilakukan penilaian keberhasilannya. Penilaian tersebut didasarkan atas informasi hasil penilaian dari berbagai pihak. Implikasi dari penilaian semacam ini akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan institusi, baik berupa keputusan perbaikan, pengembangan disamping peningkatan efektifitas pengorganisasian maupun pengelolaannya.

Adapun penilaian hasil belajar, merupakan proses pemberian nilai dengan menetapkan taraf penguasaan kemampuan mahasiswa yang diukur dengan mempergunakan instrumen pengukuran. Sedang hasilnya dinyatakan dalam bentuk skor. Apakah dalam penilaian dipergunakan acuan patokan ataupun mempergunakan penilaian acuan norma yang kemudian ditentukan nilai mahasiswa. (lihat buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas

### C. Penutup

Pada akhir pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan dari perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai waganegara terdidik dalam kehidupan selaku warga negara RI secara tanggung jawab.
2. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bersifat Pendidikan Politik dan Pendidikan Yuridik disamping juga pendidikan sosial pada umumnya.
3. Dalam pengembangan materi dalam bentuk silabi, hendaknya berspekti kemasa depan. Sedang metoda dan evaluasinya pada pelaksanaannya haruslah disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

---

Disampaikan pada lokakarya Kurikulum MPKP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyambut Civic Education Paradigma Baru Oleh Jurusan Civics Hukum/PPKn Universitas Muhammadiyah Malang , Jum'ad, 18 Mei 2000. Oleh Mansur, Budiono dan Syahri